

# Implementasi Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Publik Berkelanjutan di Kota Palangka Raya

*Implementation of Collaborative Governance in Sustainable Public Transportation Management in Palangka Raya City*

Hera Nugrahayu<sup>1\*</sup>, Djohermansyah Djohan<sup>2</sup>, Jose Rizal<sup>3</sup>, Kurniawan Utama<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya dan Yayasan Bakti Otonomi Daerah, Indonesia

\* Corresponding Author : [nugrahayuhera@gmail.com](mailto:nugrahayuhera@gmail.com)

---

## Sejarah Artikel

Diterima : 9 November 2024

Direvisi : 10 Februari 2025

Disetujui : 01 Maret 2026

## Kata Kunci:

Tata Kelola Kolaboratif, Transportasi Publik, Kota Palangka Raya, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Transportasi Berkelanjutan.

© 2026 Penulis

Diterbitkan oleh Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Palangka Raya. Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>

**Abstrak.** Pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya menghadapi berbagai tantangan, seperti menurunnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, serta berkembangnya transportasi online yang belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik dengan pendekatan kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan komitmen antar pemangku kepentingan menyebabkan pelayanan transportasi publik belum optimal. Diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan, integrasi transportasi online dengan moda publik, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, penerapan Collaborative Governance dapat menjadi strategi efektif untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

---

## Sejarah Artikel

Received: November 9, 2024

Revised: February 10, 2025

Accepted: March 1, 2026

## Kata Kunci:

Collaborative Governance, Public Transportation, Palangka Raya City, Stakeholder Collaboration, Sustainable Transportation.

© 2026 Penulis

Published by Palangka Raya University's Master of Urban and Regional Planning Postgraduate. This article is available to the general public under a license:



<https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>

**Abstract.** Public transportation management in Palangka Raya City faces several challenges, including the decline in the quality and quantity of public transport services, increasing private vehicle use, and the rapid growth of non-integrated online transportation. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in public transportation management using a qualitative approach through Focus Group Discussions (FGDs), in-depth interviews, and secondary data analysis. The findings indicate that weak coordination and commitment among stakeholders have hindered the effectiveness of public transportation services. Strengthening cross-sector collaboration, improving service quality, integrating online and public transportation systems, and supporting sustainable policies are essential for addressing these challenges. In conclusion, Collaborative Governance can serve as an effective strategy for developing a safe, integrated, and sustainable public transportation system in Palangka Raya City.

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan kawasan perkotaan yang diikuti oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas sosial-ekonomi telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat. Transportasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung pergerakan penduduk, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan menjadi

salah satu indikator penting dalam pembangunan perkotaan karena mampu meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kemacetan, serta menekan dampak negatif terhadap lingkungan (Rahmawati, Pattiasina, & Syaranamual, 2022). Namun demikian, banyak kota di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan transportasi publik yang berkualitas dan berkelanjutan (Maria Margaretha & Aji Nugroho, 2023).

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah penduduk dan perluasan kawasan permukiman mendorong meningkatnya kebutuhan transportasi untuk menunjang aktivitas Masyarakat (Perkasa et al., 2026). Di sisi lain, kualitas dan kuantitas transportasi publik di Kota Palangka Raya cenderung mengalami penurunan (Karimullah, Rizal, & Irawan, 2024). Moda transportasi umum seperti angkutan kota (mikrolet) semakin berkurang jumlahnya dan kehilangan daya saing akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi serta berkembangnya layanan transportasi berbasis aplikasi daring (Nope, Antjak, & Pratama, 2025).

Kemudahan memperoleh kendaraan pribadi melalui berbagai skema pembiayaan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi, sementara penggunaan transportasi publik terus menurun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan layanan angkutan umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan konsumsi energi, serta pencemaran lingkungan (Anggraeni, Renatasari, Pakpahan, & Wati, 2024).

Perkembangan transportasi online juga memberikan tantangan baru dalam pengelolaan transportasi publik. Kehadiran transportasi berbasis aplikasi mampu memberikan layanan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, transportasi online belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang ada. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan angkutan umum konvensional serta memengaruhi keberlangsungan usaha para pelaku transportasi lokal. Selain itu, belum optimalnya regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan pengelolaan transportasi publik menjadi semakin kompleks (Said & Saraswati, 2025).

Permasalahan transportasi publik merupakan isu multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk sektor swasta, operator transportasi, akademisi, komunitas, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kompleksitas permasalahan transportasi menuntut adanya mekanisme kerja sama yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks tersebut, pendekatan Collaborative Governance menjadi salah satu alternatif yang relevan untuk diterapkan.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai pengaturan tata kelola yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi, dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Melalui kolaborasi yang baik, setiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama (Anggraeni et al., 2024). Penerapan Collaborative Governance dalam sektor transportasi publik telah banyak direkomendasikan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas layanan dan keberlanjutan sistem transportasi (Anastasya & Putri, 2024). Kolaborasi antar pemangku kepentingan memungkinkan terciptanya integrasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Said & Saraswati, 2025). Bagi Kota Palangka Raya, pendekatan ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya infrastruktur transportasi, lemahnya koordinasi antar aktor, serta belum optimalnya integrasi antara transportasi konvensional dan transportasi online (Kemala Dewi & Aris Krisdiyanto, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya. Penelitian ini

juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang berkelanjutan, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas Masyarakat (Satyadharna et al., 2024). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun kebijakan transportasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan perkotaan di masa mendatang (Herdiani & Luthfi Faisal Natsir, 2025) .

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi publik serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya (Fiantika, Wasil M, 2022).

Lokasi penelitian berada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik yang melibatkan pemerintah daerah, operator transportasi, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis penelitian menggunakan kerangka Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya (Anwar, Angraeni, & Djamal, 2020). FGD dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi transportasi publik, bentuk kolaborasi yang telah berlangsung, serta berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai peran, kepentingan, komitmen, dan partisipasi masing-masing aktor dalam proses kolaborasi.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta berbagai hasil penelitian dan literatur yang relevan dengan tema transportasi publik dan Collaborative Governance. Data tersebut digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Ridder (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari FGD, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola hubungan antaraktor, bentuk kolaborasi yang terbangun, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kondisi Eksisting Transportasi Publik di Kota Palangka Raya**

Transportasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi transportasi publik di Kota Palangka Raya saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah menurunnya jumlah dan kualitas angkutan umum yang beroperasi. Moda transportasi konvensional seperti mikrolet yang sebelumnya menjadi sarana transportasi utama masyarakat kini semakin berkurang jumlahnya dan tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Penurunan penggunaan angkutan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi akibat kemudahan akses pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi ini

menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih fleksibel, nyaman, dan efisien. Kedua, berkembangnya transportasi berbasis aplikasi daring yang menawarkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan memiliki sistem tarif yang transparan. Kehadiran transportasi online secara signifikan mengubah pola mobilitas masyarakat dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional angkutan umum konvensional.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi publik di Kota Palangka Raya masih relatif terbatas. Fasilitas pendukung seperti halte, terminal, ruang tunggu penumpang, sistem informasi perjalanan, dan jaringan transportasi yang terintegrasi belum tersedia secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kenyamanan pengguna transportasi publik menjadi rendah sehingga semakin mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan angkutan umum.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya sistem transportasi terpadu yang mampu menghubungkan berbagai moda transportasi secara efektif. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh layanan transportasi yang terintegrasi dari kawasan permukiman menuju pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

### **3.2 Starting Conditions dalam Implementasi Collaborative Governance**

Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kondisi awal (*starting conditions*) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Kondisi awal mencakup distribusi sumber daya, tingkat kepercayaan antaraktor, pengalaman kerja sama sebelumnya, serta insentif untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya ditandai oleh adanya ketimpangan kapasitas dan kepentingan antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan sistem transportasi, tetapi menghadapi keterbatasan anggaran serta sumber daya untuk mengembangkan layanan transportasi publik yang memadai. Sementara itu, operator transportasi konvensional mengalami tekanan ekonomi akibat menurunnya jumlah pengguna dan meningkatnya persaingan dengan transportasi online. Di sisi lain, penyedia layanan transportasi online memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, keberadaan mereka sering dipersepsikan sebagai ancaman oleh pelaku transportasi konvensional karena dianggap mengurangi pangsa pasar angkutan umum yang telah ada sebelumnya. Perbedaan kepentingan ini menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya kolaborasi yang kuat dalam pengelolaan transportasi publik.

Dari perspektif masyarakat, kebutuhan terhadap transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses menjadi pertimbangan utama dalam memilih moda transportasi. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memilih layanan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan transportasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memerlukan mekanisme kolaborasi yang mampu menyatukan berbagai kepentingan tersebut dalam satu tujuan bersama.

### **3.3 Institutional Design dalam Pengelolaan Transportasi Publik**

Desain kelembagaan (*institutional design*) menjadi faktor penting dalam membangun proses kolaborasi yang efektif. Desain kelembagaan mencakup aturan main, mekanisme koordinasi, struktur organisasi, dan forum komunikasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan berinteraksi secara setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya mendorong pengembangan transportasi publik melalui berbagai program dan kebijakan daerah. Namun, hingga saat ini belum terdapat mekanisme kelembagaan yang secara khusus mengatur kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan transportasi publik. Forum koordinasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum melibatkan seluruh aktor secara berkelanjutan. Keterbatasan kelembagaan tersebut menyebabkan proses komunikasi dan koordinasi antaraktor belum berjalan secara optimal. Banyak keputusan yang masih didominasi oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan partisipasi aktif dari operator transportasi, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat. Akibatnya, berbagai kebijakan yang dihasilkan sering kali belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak secara seimbang.

Selain itu, regulasi terkait integrasi transportasi online dan transportasi konvensional masih memerlukan penyempurnaan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menghambat pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan melalui pembentukan forum kolaborasi yang permanen, penyusunan regulasi yang lebih adaptif, serta peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

### **3.4 Facilitative Leadership dalam Mendorong Kolaborasi**

Keberhasilan Collaborative Governance juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership). Kepemimpinan ini berfungsi untuk membangun komunikasi, mengurangi konflik, memfasilitasi dialog, dan mendorong terciptanya kesepakatan antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kolaborasi di sektor transportasi publik. Sebagai pemegang kewenangan, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan dan mengarahkan proses perumusan kebijakan transportasi. Namun, peran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan transportasi publik. Beberapa program yang direncanakan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan kebutuhan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan belum adanya visi bersama yang kuat turut memengaruhi efektivitas kepemimpinan kolaboratif. Meskipun demikian, hasil FGD menunjukkan adanya kesadaran dari berbagai pihak mengenai pentingnya penguatan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perannya sebagai fasilitator dan penggerak kolaborasi antaraktor.

### **3.5 Collaborative Process dalam Pengelolaan Transportasi Publik**

Proses kolaboratif (collaborative process) merupakan inti dari Collaborative Governance. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa proses kolaboratif mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses (commitment to process), pemahaman bersama (shared understanding), dan pencapaian hasil sementara (intermediate outcomes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dialog antar pemangku kepentingan telah dilakukan melalui berbagai forum diskusi, rapat koordinasi, dan FGD. Forum-forum tersebut menjadi sarana bagi para aktor untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapan terkait pengembangan transportasi publik. Namun demikian, proses dialog masih berlangsung secara insidental dan belum menjadi mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan.

Dari aspek pembangunan kepercayaan, hubungan antaraktor masih menghadapi berbagai tantangan. Operator transportasi konvensional masih memandang transportasi online sebagai pesaing yang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Sebaliknya, penyedia layanan transportasi online menilai bahwa inovasi teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan sistem transportasi modern. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antaraktor masih perlu diperkuat. Meskipun demikian, seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat. Kesamaan tujuan tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya pemahaman bersama mengenai pentingnya transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan adanya visi bersama tersebut, peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat menjadi semakin terbuka.

### **3.6 Strategi Penguatan Collaborative Governance untuk Transportasi Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Collaborative Governance dapat diperkuat melalui beberapa strategi. Pertama, membentuk forum kolaborasi transportasi yang melibatkan pemerintah daerah, operator transportasi, pelaku transportasi online, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan transportasi secara bersama-sama. Kedua, mengembangkan sistem transportasi terintegrasi melalui konsep angkutan utama dan angkutan pengumpan (feeder system). Integrasi ini memungkinkan transportasi online maupun angkutan kota berperan sebagai penghubung menuju moda transportasi utama sehingga tercipta sistem transportasi yang lebih efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas

infrastruktur transportasi publik melalui pembangunan halte, terminal, kawasan transit, dan fasilitas pendukung lainnya. Keempat, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan transportasi, seperti sistem informasi perjalanan, pembayaran elektronik, dan aplikasi layanan transportasi terpadu.

Kelima, mengembangkan layanan transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang didukung jaringan feeder untuk menjangkau kawasan permukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas publik. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, Kota Palangka Raya memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implementasi Collaborative Governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola transportasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan di masa depan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Palangka Raya belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan masih dihadapi, antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, berkembangnya transportasi berbasis aplikasi yang belum terintegrasi dengan sistem transportasi publik, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan transportasi publik belum mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) faktor starting conditions menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan kapasitas antar pemangku kepentingan yang memengaruhi proses kolaborasi. Dari aspek institutional design, mekanisme koordinasi dan forum kolaborasi yang melibatkan seluruh aktor belum berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, aspek facilitative leadership menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan peran sebagai fasilitator, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyinergikan kepentingan para pihak. Pada aspek collaborative process, komunikasi dan dialog antaraktor telah dilakukan, namun belum menghasilkan komitmen dan integrasi yang kuat dalam pengelolaan transportasi publik.

Oleh karena itu, penguatan Collaborative Governance perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pembentukan forum kolaborasi yang lebih efektif, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan transportasi. Dengan dukungan komitmen seluruh pihak, penerapan Collaborative Governance diharapkan mampu mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.

## Daftar Pustaka

- Anastasya, R., & Putri, S. B. (2024). SDGs 7: Efektivitas Program Penggunaan Bus Listrik Guna Mendorong Transportasi Publik Ramah Lingkungan. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, Vol. 1, p. 13. pdfs.semanticscholar.org. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.343>
- Anggraeni, D. P., Renatasari, C., Pakpahan, P. A. R., & Wati, S. F. A. (2024). Analisis Peningkatan Jumlah Transportasi Kota Surabaya Menggunakan Sistem Dinamik. *Koloni*, 3(2), 237–250. <https://doi.org/10.31004/koloni.v3i2.649>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwar, S., Angraeni, R., & Djamal, K. (2020). Function of Trust in Building Social Solidarity in the Community Fishermen. *Komunitas*, Vol. 12, pp. 28–35. Universitas Negeri Semarang. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.19563>
- Fiantika, Wasil M, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, pp. 1–179. repository.umi.ac.id. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Herdiani, H., & Luthfi Faisal Natsir. (2025). Analisis Strategi Pengurangan Kemacetan di Kota Bandung (Pendekatan Kolaborasi Kebijakan Transportasi). *Jurnal Aspirasi*, 15(2), 66–77. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v15i2.139>
- Karimullah, A., Rizal, A., & Irawan, A. S. Y. (2024). Perancangan Ui/Ux Aplikasi Transportasi Publik Berbasis Mobile Dengan Metode User Centered Design. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4855>
- Kemmala Dewi, & Aris Krisdiyanto. (2023). Pengembangan Sistem Transportasi Masa Depan: Mobilitas Berkelanjutan dan Otonom di Jawa Barat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 2, pp. 750–760. pdfs.semanticscholar.org. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.626>
- Maria Margaretha, A., & Aji Nugroho, A. (2023). Transportasi Publik Terintegrasi: Optimalisasi Implementasi Smart Mobility di DKI Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 5(2), 47–58. <https://doi.org/10.32834/jplan.v5i2.676>
- Nope, F. J. S., Antjak, A. L., & Pratama, P. P. (2025). Perencanaan Rute Busway Terpadu Sebagai Sistem Transportasi Massal di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 101–113. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i2.101-113>
- Perkasa, P., Sigin, W. Y., Permanasuri, N. P. D. A., Aguswan, Y., Siahaan, A. P., & Ovany, R. (2026). System Dynamics Modelling of Population Growth and Waste Management Landfill Capacity Sustainability in Palangka Raya. *Gema Lingkungan Kesehatan*, 24(1 SE-Research Articles), 140–149. <https://doi.org/10.36568/gelinkes.v24i1.438>
- Rahmawati, T., Pattiasina, T. J., & Syaranamual, M. S. (2022). Sistem Informasi Geografis Jalur Transportasi Angkutan Umum Berbasis Web: Studi Kasus Terminal Mardika Kota Ambon. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(1). <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i1.5629>
- Ridder, H.-G. (2014). Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift Für Personalforschung*, 28(4), 485–487. <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Said, L. B., & Saraswati, R. A. (2025). Optimasi Sistem Transportasi Perkotaan untuk Mereduksi Kemacetan Menggunakan Model Simulasi Lalu lintas. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 2365–2375. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i3.57899>
- Satyadharna, M., Mokui, H. T., Adris Ade Putra, Laode Muhammad Golok Jaya, Abdul Kadir, & Arsyad, L. O. M. N. (2024). Peran Teknologi Informasi Dan Mekanisme Collaborative Governance Mendukung Penyelenggaraan Transportasi Berkelanjutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Media Konstruksi*, 9(3), 211–218. <https://doi.org/10.33772/medkons.v9i3.59>